

ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PADA KELOMPOK USAHA TEKSTIL KECIL DAN MENENGAH DI PEKALONGAN

Bernadetta Diana Nugraheni*

Cyrillius Martono

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jalan Dinoyo 42-44, Surabaya

*bernadetta@ukwms.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 28, 2020

Revised June 10, 2020

Accepted June 30, 2020

Key words:

**Good Corporate Governance, Small
Medium Enterprise, Cluster Analysis**

DOI:

<https://doi.org/10.33508/jako.v12i2.2325>

ABSTRACT

A good management inside a company will result a good performance and it is also applicable in small medium enterprise (SME). SME must implement good corporate governance (GCG) principle which are transparency, accountability, responsibility, independency, fairness and equality. The aim of this research is to study and analyze the implementation of the GCG which would be linked to those 5 principles mentioned before. The object of this research is taking sample of SME in textile industries in Pekalongan, Center of Java. With 96 respondents, using Cluster Analysis method and utilizing score table, it can be understood that the implementation of GCG in this industry is far below expectation which is around 50% and 48% who already implement it. The responsibility principle is the most implemented in this industry followed by independency, fairness and equality principle. Whereas transparency and accountability are the worst to be implemented. From the differentiating test it can be conclude that transparency principle is showing the most difference between all the respondents clusters.

ABSTRAK

Pengelolaan yang baik pada perusahaan akan menghasilkan kinerja yang baik. Hal ini juga berlaku bagi UMKM. Pengelolaan UMKM harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola korporat yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan juga prinsip kewajaran dan kesetaraan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis penerapan tata kelola korporat yang dikaitkan dengan 5 prinsip di atas. Objek penelitian ini mengambil sampel pada UMKM di industri produk-produk tekstil di Pekalongan, Jawa Tengah. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 96 dan menggunakan pengujian Cluster Analysis dan tabel skor dapat diketahui bahwa implementasi tata kelola korporat pada industri ini masih jauh dari yang diharapkan sekitar 50% dan yang telah mengimplementasikan tata kelola korporat dengan baik sebesar 48%. Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban adalah yang paling banyak diterapkan kemudian diikuti oleh prinsip independensi dan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Sedangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah yang paling buruk penerapannya. Dan dari uji beda diperoleh hasil bahwa prinsip transparansi menunjukkan adanya perbedaan yang paling besar diantara tiap-tiap cluster responden.

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis pada kelompok ekonomi usaha kecil serta usaha menengah sangat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara nasional. Sebagai wujud nyata pertumbuhan adalah dibuktikan dengan kemampuan menyerap banyak tenaga kerja dan kemampuan dalam mendistribusikan hasil-hasil

usaha. Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pada sektor ekonomi usaha kecil serta menengah telah membuktikan perhatian terhadap pelaku usaha tersebut dengan mengatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang klasifikasi jenis usaha bagi pelaku bisnis pada kelompok usaha kecil dan usaha menengah.

Permasalahan secara umum terjadi serta dihadapi oleh pelaku ekonomi usaha adalah terkait dengan keuangan dan non-keuangan (organisasi manajemen) Niode (2009). Masalah keuangan yang dihadapi yaitu: (1) Akses bagi pelaku ekonomi usaha kecil terhadap ketersediaan dana masih kurang; (2) Belum tercipta suatu sistem untuk membantu permodalan bagi pelaku ekonomi usaha kecil serta usaha menengah; (3) Belum ada prosedur yang sederhana dalam permohonan kredit bagi pelaku ekonomi usaha kecil dan usaha menengah, sehingga berdampak pada waktu proses yang lama; (4) Pelaku usaha pada sektor kecil dan menengah menghadapi kesulitan untuk dapat mengakses pada lembaga-lembaga formal yang memberikan bantuan permodalan, sehingga mencari sumber modal yang mudah tetapi dengan bunga yang tinggi; dan (5) Laporan keuangan yang dibuat pelaku ekonomi usaha kecil dan menengah masih belum sesuai dengan lembaga-lembaga keuangan yang membantu permodalan karena kurangnya pengetahuan dalam hal penyusunan laporan keuangan. Permasalahan dalam pengelolaan organisasi (non keuangan) adalah (1) Kurangnya kesempatan bagi pelaku usaha untuk ikut serta dalam pelatihan dan keterampilan di bidang teknik produksi, sehingga pengetahuan yang dimiliki terkait dengan teknik produksi serta penguasaan kualitas produksi sangat lemah demikian pula yang terkait dengan pengetahuan di bidang pemasaran, karena informasi mengenai pasar dan ketersediaan barang dan jasa yang terbatas; (2) Keterbatasan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, bidang keuangan dan akuntansi.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kontribusi bagi pelaku ekonomi usaha kecil dan menengah dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha agar masyarakat sejahtera, maka UMKM perlu dikelola dengan baik. Hasil yang baik akan tercermin pada peningkatan kinerja operasional perusahaan juga pengembalian modal yang lebih tinggi, yang nantinya akan berdampak pada penilaian yang baik atas perusahaan tersebut di mata investor dan investor potensial. Shahab (2012) dalam risetnya menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan yang baik dapat dibangun melalui peningkatan pemberdayaan karyawan dan perbaikan tata kelola perusahaan. Pengelolaan UMKM tidak berbeda dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Hal ini didukung penelitian Shahab (2012) yang dapat menunjukkan bahwa pemberdayaan karyawan dan tata kelola UKM yang memadai berdampak

terhadap peningkatan kinerja UKM.

Pengelolaan UMKM harus mengimplementasikan prinsip-prinsip atau asas tata kelola korporat yang baik, meliputi: asas transparan, asas pertanggungjawaban, asas kewajiban, asas independen juga kewajaran dan kesetaraan. Prinsip penerapan asas tata kelola adalah umum atau universal. Prinsip yang tertuang dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), untuk melaksanakan tata kelola yang baik maka perlu adanya pilar yang mendukung pelaksanaannya yaitu (1) Sebagai pihak yang mengatur dan mengawasi adalah negara beserta instrumennya; (2) Sebagai pelaku yang berada di pasar usaha adalah pelaku bisnis; dan (3) Sebagai pelanggan produk yang dihasilkan oleh badan usaha adalah masyarakat.

Ketersediaan informasi yang relevan menjadi perhatian bagi yang berkepentingan dalam asas transparansi. Asas akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan secara tepat dan terukur kepada entitas pelaporan. Prinsip tanggung jawab atau tanggung jawab menjelaskan bahwa, kepatuhan terhadap aturan hukum dan tanggung jawab dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Prinsip independensi menekankan bahwa perusahaan harus dijalankan dengan atau tanpa memunculkan konflik kepentingan antar para pemangku kepentingan. Prinsip *fairness* adalah merupakan hak bagi pemangku kepentingan yang menginginkan adanya keadilan dan kesetaraan sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Penelitian yang terkait dengan UMKM pada usaha mebel di provinsi DIY oleh Putri dan Bakhtiar (2015) memberikan penjelasan arti pentingnya menyusun laporan keuangan secara kontinu bagi usaha kecil, mikro dan menengah, yang dipergunakan sebagai pengendalian internal di bidang keuangan agar terbentuk proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi serta untuk pengontrolan suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan Zhang dan Thiam (2014), memberikan penilaian pada *stakeholder* dalam peran sertanya terhadap pelaksanaan tata kelola SME pada pemegang saham perusahaan yang memiliki SME di Perancis. Jika pelaksanaan tata kelola baik, maka akan berdampak pada reputasi SME sehingga organisasi SME akan memprioritaskan pada transparansi dan akuntabilitas keuangan bagi pemegang saham dan para kreditor. Menurut Koech dkk. (2016) hasil temuan menunjukkan terdapat korelasi positif dari karakteristik *board* dengan *corporate governance*,

Artinya bahwa pemimpin perusahaan memiliki integritas, memiliki prosedur yang benar dalam mencari pemimpin atau direksi. Sehingga organisasi mempunyai bentuk pengelolaan yang baik.

Manfaat diterapkannya proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi serta pengontrolan menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG, 2004) yaitu meminimalkan *agency cost*. Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan di antara agen sebagai manajerial yang bertindak untuk menjalankan perusahaan bagi kepentingan prinsipal. Inilah yang mendasari mengapa perusahaan besar menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Sedangkan dalam teori terkait dengan penjelasan bahwa manajer melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan perusahaan atau organisasi dijelaskan dalam teori *stewardship* (Donaldson dan Davis, 1989). Teori tersebut juga menjelaskan *corporate governance* dalam paradigma komunitarian (*communitarian paradigm*), Menurut Koech dkk. (2016) disebutkan bahwa teori ini dapat menjelaskan bagaimana kepentingan pemegang saham lebih diutamakan dalam organisasi.

Menurut Palupijati dan Sivilokonon (2013) dikatakan bahwa banyak pelaku ekonomi usaha mikro menengah bertindak juga sebagai manajemen dalam bisnisnya, sedangkan menurut (Hart, 1995) jika pemegang saham melakukan kontrol bisnis maka masalah keagenan dapat dihindari yang timbul akibat pemilik bertindak sebagai manajemen. Hal ini dapat dijadikan sebagai alasan bahwa usaha kecil dan menengah tidak menerapkan tata kelola (Lane dkk., 2006). Padahal di Indonesia, lebih dari 90% usaha adalah bentuk usaha mikro dan menengah, dimana usaha tersebut berkontribusi di atas 95% penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Biro Pusat Statistik, 2011). Penelitian sebelumnya yang fokus pada implementasi tata kelola korporat yang baik pada UMKM adalah Maskur (2012) dan Palupijati dan Sivilokonon (2013).

Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang dikutip Koran Sindo (diunduh 26 Januari 2017), bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dimana saat ini terdapat kelompok industri tekstil yang memberikan kontribusi nilai investasi sebesar 4,6 trilliun rupiah di tahun 2015. Hal ini sejajar dengan nilai investasi industri tekstil yang mencapai 56% dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 80.000 tenaga kerja yang tersebar pada 188 proyek. Kontribusi Jawa Tengah tersebut setara dengan 56% dari total investasi

tekstil di Indonesia. Melihat dari perkembangan industri tekstil di Jawa Tengah, fokus pada pengelolaan usaha dengan menerapkan asas GCG menjadi sangat penting.

Penelitian ini melakukan kajian mengenai penerapan GCG yang baik pada industri produk tekstil dikota Pekalongan yang dikaitkan dengan prinsip transparan, pertanggungjawaban, kewajiban, independen, kewajaran dan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi serta untuk pengontrolan yang dikaitkan dengan 5 prinsip (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi kewajiban) di industri produk tekstil kecil dan menengah.

Manfaat yang diharapkan bagi Pemerintah adalah sebagai dasar bagi penyusunan pedoman pelaksanaan tata kelola korporat yang baik bagi UMKM. Bagi industri produk tekstil UMKM adalah lebih memperbaiki dan meningkatkan tata kelola organisasinya agar kinerja operasionalnya menjadi semakin baik. Sedangkan bagi akademik, dapat memberikan referensi mengenai implementasi prinsip-prinsip tata kelola organisasi UMKM dan sebagai landasan bagi akademisi untuk memberikan solusi terbaik praktik tata kelola korporat organisasi UMKM yang baik.

KAJIAN LITERATUR

Kajian Literatur

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah prinsip yang digunakan untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah dalam hubungan antara pelaku bisnis dan agen. Secara umum, hubungan tersebut adalah antara pemegang saham sebagai prinsipal dan eksekutif perusahaan sebagai agen. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu atau lebih prinsipal melibatkan agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang mendelegasikan otoritas pembuat keputusan untuk agen. Masalah prinsipal dan agen terjadi ketika timbul konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Perusahaan harus berusaha meminimalkan situasi ini melalui kebijakan yang kuat. Konflik kepentingan terjadi ketika suatu entitas atau individu tidak dapat diandalkan karena terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan tugas atau tanggung jawab profesional. Konflik kepentingan melekat dalam hubungan dimana satu pihak diharapkan bertindak demi kepentingan

pihak lain. Keuangan perusahaan, masalah keagenan biasanya mengacu pada konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Manajer bertindak sebagai agen untuk pemegang saham atau prinsipal, diharapkan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham meskipun manajer memiliki kepentingan terbaik untuk memaksimalkan kekayaannya sendiri.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen adalah memaksimalkan utilitas dengan minat yang berbeda dan bahwa karena adanya asimetri informasi, agen tidak akan selalu bertindak terbaik untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat membatasi perbedaan kepentingan dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan dengan mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya agensi.

Biaya agensi meliputi (1) Monitoring terhadap pengeluaran oleh prinsipal untuk membatasi aktivitas penyimpangan yang dilakukan oleh agen; (2) *Bonding expenditure* oleh agen untuk memastikan bahwa tidak akan mengambil tindakan tertentu yang dapat membahayakan prinsipal; dan (3) *Residual loss*, pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh manajer karena perbedaan keputusan agen dan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal.

Permasalahan yang terjadi pada UMKM tidak terlalu nampak, karena secara umum UMKM berbentuk usaha keluarga dimana pemilik umumnya juga sekaligus berperan sebagai manajer. Dalam konteks ini akan timbul model agensi lain ketika UMKM terdapat investor yang memiliki saham minoritas akan terjadi konflik kepentingan dengan investor yang kepemilikannya mayoritas, sehingga diperlukan pelaksanaan tata kelola untuk meminimalkan konflik

Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah teori yang menyatakan perilaku karyawan yang didorong oleh imbalan internal melakukan pekerjaan bagi orang lain atau organisasi untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab mereka. Karyawan yang berpikiran kolektif dan bekerja secara proaktif akan menuju pada pencapaian organisasi. Teori stewardship terutama berkaitan dengan mengidentifikasi situasi dan mengatur kepentingan prinsipal dan steward (Donaldson dan Davis, 1991). Berdasarkan teori tersebut terdapat faktor situasional dan psikologi yang memengaruhi individu untuk menjadi agen atau steward, di satu sisi ada faktor situasional yang mempengaruhi

eksekutif untuk menjadi steward. Beberapa faktor situasional yang mempengaruhi suatu individu terhadap steward yang bekerja dalam sistem manajemen yang berorientasi pada keterlibatan akan bertentangan dengan sistem manajemen yang berorientasi pada kontrol, budaya kolektivitas bertentangan dengan yang individualistik; budaya rentang kekuasaan yang terbatas; atau ketika struktur tata kelola perusahaan memberi otoritas dan kebijaksanaan. (Donaldson dan Davis, 1991)

Asumsi dari teori *stewardship* bahwa manajer berperilaku sebagai steward yang dapat dipercaya oleh organisasi terhadap kebaikan secara kolektif dari konstituen terlepas dari kepentingan pribadi manajer. Sehingga relevansi dari teori Stewardship terhadap UMKM kemungkinan tidak terjadi adanya bahaya moral (*moral hazard*) karena manajer (steward) memutuskan untuk bekerja atas nama pemilik, dengan demikian perbedaan resiko terjadinya perbedaan antara pemilik dan manajer yang mendorong melakukan tindakan tersembunyi dalam model agen-prinsipal tidak akan terjadi.

Tata Kelola Korporat

Terdapat berbagai definisi mengenai tata kelola organisasi. Salah satunya adalah seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan pengurus, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain seperti perusahaan, karyawan, pemasok, pelanggan, regulator, kreditor, lingkungan kerja dan masyarakat luas (OECD, 2009).

Tata kelola korporat merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tata kelola perusahaan tidak boleh dikacaukan dengan manajemen perusahaan, tata kelola berfokus pada struktur dan proses perusahaan untuk memastikan perusahaan berperilaku adil, bertanggung jawab, transparan dan dapat diprediksi. Di sisi lain manajemen perusahaan berfokus pada perangkat yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan tata kelola yang baik memastikan perusahaan dijalankan untuk kepentingan pemegang saham. Tata kelola perusahaan sebagai sebuah mekanisme dimana investor eksternal melindungi diri mereka sendiri dari pengambilalihan yang dilakukan oleh orang dalam yaitu para manajer dan pemegang

saham pengendali. Mekanisme tata kelola dimaksudkan untuk mengatur hubungan dalam ekonomi pasar antara manajer perusahaan dan pengusaha (internal) perusahaan) di satu sisi dan di sisi lain adalah pihak yang menginvestasikan sumber daya dalam perusahaan (Nugraheni dan Martono, 2015).

Konsep tata kelola organisasi di Indonesia yang kemudian dirumuskan oleh KNKG (2006), bahwa *Corporate Governance* sebagai suatu proses dimana pemegang saham mendorong manajemen untuk bertindak demi kepentingan mereka, memberikan tingkat kepercayaan agar pasar modal berfungsi secara efektif Untuk memenuhi hal tersebut, terdapat tiga pilar dalam tata kelola perusahaan meliputi; transparansi, akuntabilitas dan tata kelola yang kuat. GCG yang dijelaskan dari KNKG (2006) merupakan asas keterbukaan informasi, asas akuntabilitas, asas pertanggungjawaban, asas kemandirian, asas kesetaraan dan kewajiban. Harmanto (2011) dalam penelitian Maskur (2012), mengungkapkan manfaat/keuntungan yang diperoleh bila organisasi atau korporasi menerapkan GCG, diantaranya adalah dengan adanya GCG, kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi efek kegagalan potensial, dengan memastikan bahwa informasi tersedia bagi para pemangku kepentingan sebagai budaya transparansi. Daniri (2005) mengungkapkan tata kelola UKM harus memastikan kepatuhan terhadap hukum, undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi praktik tata kelola UKM, konsisten dengan supremasi hukum, transparan dan dapat diterapkan. Pelaksanaan tata kelola yang baik berkontribusi untuk meningkatkan reputasi efisiensi perusahaan dan memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan sebagai daya tarik minat investor sehingga perusahaan akan lebih menikmati kepercayaan publik. Selain dari itu, menurut Maskur (2012), aspek lain yang mendukung penerapan GCG secara efektif dan dapat dikatakan paling strategis ketika struktur tata kelola perusahaan memungkinkan manajer, dewan direksi dan pemegang saham memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing. Pada gilirannya harus secara signifikan meningkatkan efisiensi operasi perusahaan di semua tingkatan, proses ini mengarah pada kinerja operasi yang lebih baik dan pengeluaran modal lebih efisien sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan penjualan.

Pelaksanaan Tata Kelola di UMKM

Menurut Bank Dunia, UMKM dikelompokkan dalam 3 bidang usaha yaitu kelompok mikro, kelompok kecil dan kelompok menengah dengan demikian dalam sudut pandang usaha UMKM diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu: UKM sektor informal (*livelihood activities*), Kedua, UKM Mikro sebagai pengrajin yang memiliki jiwa kewirausahaan masih tergolong kurang. Ketiga, UKM digolongkan mampu mengembangkan bisnis akan menjalin hubungan dan bekerjasama dengan pihak lain. Keempat, *Fast Moving Enterprise* adalah UKM tergolong memiliki kemampuan *entrepreneurship* dan siap untuk melakukan transformasi perubahan dalam skala usaha besar. Undang-Undang tentang UMKM Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan pengelompokan usaha berdasarkan jumlah aset dan penghasilan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan serta kepemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pribadi atau sebagian kecil orang maka dikelompokkan sebagai UMKM .

Tabel 1. Kriteria UMKM

SKALA USAHA	SKALA	
	ASSET	PENDAPATAN
MIKRO	Sampai 50 juta rupiah	Sampai Rp300 juta /th
KECIL	> Rp50 juta - Rp500 juta	> Rp300 juta - Rp2,5milyar/th
USAHA MENENGAH	> Rp500 juta - Rp10milyar	> Rp2,5 milyar - Rp50 milyar

Sumber: LPPI (2015)

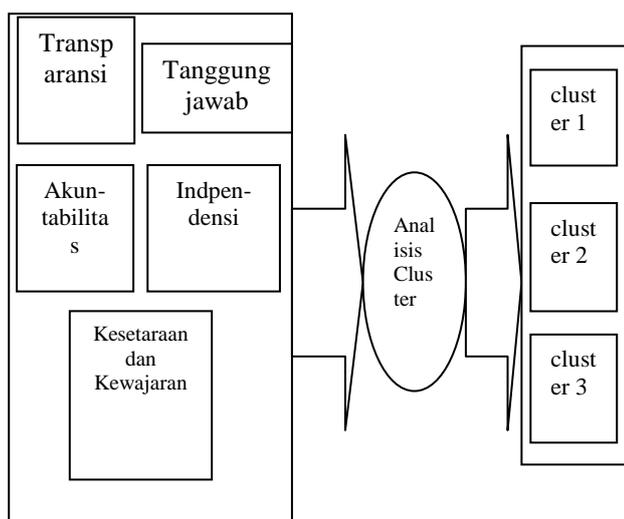
Penjelasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI, 2015), aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki spesifikasi tersendiri meliputi: Belum ada standar mutu, ragam produk masih spesifik, varietas produk sedikit. Demikian juga dengan daya tampung dan harga produk, bahan dasar yang masih diskriminatif dan kesinambungan produk belum teruji.

Penelitian yang menggunakan objek UMKM dilakukan oleh Maskur (2012) memberikan hasil bahwa GCG yang diterapkan dapat dikategorikan baik. Akan tetapi bila ditinjau setiap asas GCG menunjukkan bahwa UMKM tersebut masih belum baik dalam melaksanakan asas transparan, asas pertanggungjawaban, asas responsibilitas dan independensi sedangkan asas kewajiban dan kesetaraan telah dilaksanakan dengan baik.

Penelitian selanjutnya oleh Palupijati dan Sivilonom (2013) yang bertujuan mempelajari

penerapan prinsip tata kelola pada perusahaan skala kecil menengah dan secara spesifik penelitian tersebut membandingkan penerapan tata kelola tersebut pada usaha keluarga dan pada usaha non-keluarga usaha skala kecil dan menengah. Aspek yang diteliti adalah transparansi dan pertanggungjawaban, kewajiban, independensi dan keadilan. Kedua tipe bisnis dapat dibandingkan berdasarkan struktur bisnis, struktur kepemilikan, rewards, pendapatan, karir. Hasil penelitian menunjukkan hasil pada kedua tipe bisnis telah melaksanakan tata kelola meskipun masih belum maksimal. Pada struktur bisnis dan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi maka tingkat transparansi, akuntabilitas, independensi dan keadilan semakin menurun, demikian pula dengan sebaliknya jika struktur bisnis dan kepemilikan menyebar maka 5 aspek tata kelola semakin baik.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional dan Pengukuran

Desain penelitian kuantitatif serta menggunakan studi deskriptif (*descriptive study*) maka data statistik deskriptif dipakai ilustrasi yang bersifat umum. Instrumen (alat ukur) pada penelitian menggunakan daftar pertanyaan berdasarkan pedoman *Good Corporate Governance* dikeluarkan oleh KKNK (2006) terkait penerapan tata kelola pada UMKM produk tekstil. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dioperasionalkan sebagai berikut: (1) Transparansi, adalah prinsip yang menjamin akses untuk memperoleh informasi tentang kebijakan proses

pembuatan serta hasil keuangan dan non-keuangan; (2) Akuntabilitas adalah, tingkat pertanggungjawaban berkaitan dengan sistem yang dimiliki perusahaan; (3) Responsibilitas adalah status tanggung jawab yang meliputi moral, hukum, kepercayaan, keandalan yang menjadi tanggung jawab seseorang; (4) Independensi adalah, suatu keadaan atau posisi perusahaan tidak terikat pada pihak manapun atau tidak mengutamakan kepentingan pihak tertentu; dan (5) Kewajaran dan kesetaraan adalah, perlakuan yang setara dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasar pada perjanjian dan peraturan. Hierarki pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert yaitu 1 = buruk sekali; 2 = buruk; angka 3 = baik; dan angka 4 = baik sekali. Jawaban ragu-ragu/netral tidak digunakan dalam skala ini, agar peneliti memperoleh jawaban yang lebih dapat menjelaskan bagaimana tata kelola pada UMKM produk tekstil.

Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, melalui penyebaran kuesioner ke beberapa industri produk tekstil UKM, khususnya yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Responden terpilih mengisikan kuesioner berdasarkan instruksi yang ada. Kuesioner yang disebar sebanyak 200 kuesioner, dimana penyebarannya melalui 2 tahap, masing-masing 100 kuesioner. Berdasarkan hasil lembar daftar pertanyaan yang terkumpul dan dapat diolah sebanyak 96 lembar daftar pertanyaan.

Populasi dan Sampel

Responden penelitian ini merupakan industri produk tekstil kecil dan menengah. Sedangkan teknik pengumpulan sampel dengan *random sampling*. Teknik sampling acak karena populasi dalam penelitian diasumsikan homogen (mengandung satu ciri) dengan demikian sampel diambil secara acak. Cara yang dipakai sampling acak sederhana (*simple random sampling*). Beragam jenis industri produk tekstil kecil dan menengah yang bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap.

Teknik Analisis Data

Analisis Cluster

Teknik analisis yang pertama adalah analisis cluster. Tujuan utama peneliti menggunakan teknik ini, sesuai dengan pemaparan Simamora (2005) dan Sarwono (2009) adalah dengan mengelompokkan sesuai kriteria sehingga objek-objek tersebut memiliki variasi di dalam cluster (*within cluster*) relatif kecil jika membandingkan variasi antar

cluster (*between cluster*). Pengelompokan narasumber terhadap penerapan tata kelola korporat ini dilakukan terkait atribut-atribut Transparansi, Akuntabilitas, Tanggungjawab, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan dengan bantuan software SPSS 16.0.

Tahapan analisis cluster adalah sebagai berikut :

1. Menyusun klaster melalui klasifikasi data dengan metode hirariksi klaster atau K-means Cluster. Analisis data, peneliti memakai analisis crosstab dan metode yang dipergunakan adalah: *K-means Clustering* pada *software SPSS 16.0*
2. Klaster yang dibentuk, selanjutnya dipakai untuk interpretasi terhadap cluster.
3. Menguji Profiling cluster untuk memperoleh gambaran dari karakteristik tiap klaster berdasar profil responden. Selanjutnya menguji validasi klaster, hasil uji validasi cluster tersaji pada tabel ANOVA nilai Signifikansi.

Analisis Crosstab

Analisis tabulasi silang adalah metode untuk menganalisis secara kuantitatif hubungan antara beberapa variabel. Juga dikenal sebagai tabel kontingensi, variabel tabulasi silang kelompok untuk memahami korelasi antara variabel yang berbeda. Hal ini menunjukkan bagaimana korelasi berubah dari satu pengelompokan variabel ke variabel lain. (Santoso, 2008). Tabulasi silang sering digunakan dalam analisis survei untuk menentukan hasil tanggapan survei dan membandingkan bagaimana kelompok memberikan jawaban atas pertanyaan tertentu.

Uji Chi Square

Statistik chi square umumnya digunakan untuk menguji hubungan antara variabel kategori. Hipotesis nol dari hasil uji chi square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel kategori dalam populasi. Teknik analisis dengan tabulasi silang dari profil responden (jenis usaha) dengan klaster yang sudah terbentuk. Interpretasi dalam uji Chi Square berdasarkan suatu probabilitas.

Teknik analisa data sederhana yang dipergunakan sebagai pendukung kesimpulan adalah dengan menggunakan analisis cluster yang mengkategorisasi variabel jawaban responden sesuai prinsip-prinsip tata kelola korporat. Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan GCG, peneliti menjumlahkan setiap skor dari setiap pertanyaan pada masing-masing prinsip tata kelola korporat.

Nilai yang diperoleh masing-masing prinsip tata kelola adalah skor 1 sampai dengan skor 4, apabila dijumlahkan maka total skor maksimal yang diperoleh sama dengan 88.

Tabel 2. Nilai skor yang diperoleh untuk Tata kelola

Indikator Tata kelola korporat	Jml. Pertanyaan	Nilai Skor Maksimal
Transparansi	5	16
Akuntabilitas	5	20
Responsibilitas	5	20
Independensi	5	16
Kewajaran dan Kesetaraan	5	16
Total skor		88

Sumber: Data diolah

Untuk menentukan apakah responden termasuk kategori menerapkan tata kelola korporatnya dengan baik atautkah tidak, peneliti akan menghitung terlebih dahulu menggunakan teori distribusi data. Dimana di dalam teori ini menyatakan bahwa data harus dikelompokkan ke dalam kelas-kelas. Dari hasil tersebut peneliti memasukkannya ke dalam kategori sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3. Skor indikator penerapan tata kelola korporat

Skor	Kategori
71 - 88	Baik sekali
53 - 70	Baik
35 - 52	Buruk
17 - 34	Buruk sekali

Sumber: Data diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Cluster

Analisis cluster bertujuan untuk melakukan pengelompokan objek yang didasarkan adanya kesetaraan ciri-ciri dari objek-objek tersebut. Dalam analisis ini menggunakan metode *K-Means Clustering*, yaitu menentukan jumlah klaster dalam penelitian ini adalah dengan 3 cluster. Hasil *clustering* yang pertama tersaji pada tabel pusat Cluster Awal berikut.

Tabel 4. Initial Cluster Centers

	Initial Cluster Centers		
	Cluster		
	1	2	3
Zscore(TRAN SPARANSI)	-1.20386	2.26011	-.88895
Zscore(AKU NTABILITAS)	-1.23684	2.21911	-.49628
Zscore(PERTGGJAWABAN)	.36813	1.16231	-4.79401
Zscore(INDE PENDENSI)	.61749	2.04591	.26039
Zscore(KEWAJAJARAN)	-1.34052	1.72353	.02128

Sumber: Data diolah

Tabel 4 tersebut diperlukan dalam analisis selanjutnya untuk mengetahui berapa kali proses iterasi dilakukan berdasarkan 96 sampel yang diteliti. Pada tabel 5 dapat diketahui hasil dari proses clustering dilakukan dalam 5 tahap agar memperoleh hasil yang sesuai. Sedangkan jarak minimum antar pusat clusters adalah 5,411.

Tabel 5. Iteration History^a

Iteration	Change in Cluster Centers		
	1	2	3
1	1.799	1.961	.615
2	.059	.134	.000
3	.066	.161	.000
4	.045	.100	.000
5	.000	.000	.000

Sumber: Data diolah

Pada tabel 6 merupakan *Output Final Cluster Center* yang menunjukkan proses standardisasi yang merujuk pada z-score dengan determinasi sebagai berikut:

- a. Bernilai negatif (-) bermakna, bahwa data dibawah rata-rata total.
- b. Bilai positif (+) bermakna, bahwa data diatas rata-rata total.

Tabel 6. Final Cluster Centers

	Final Cluster Centers		
	Cluster		
	1	2	3
Zscore(TRANSPARANSI)	-.55496	1.38287	-1.04641
Zscore(AKUNTABILITAS)	-.47010	1.16117	-.74313
Zscore(PERTGGJAWABAN)	-.15530	.70850	-4.79401
Zscore(INDEPENDENSI)	-.19952	.46445	.08184
Zscore(KEWAJAJARAN)	-.38107	.93320	-.48940

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 6 hasil *Final Cluster Centers*, maka dideskripsikan sebagai berikut:

Cluster -1

Dalam cluster-1 nilai yang diperoleh dari keseluruhan variabel yang diteliti menunjukkan nilai negatif (-) yang berarti data berada di bawah rata-rata total. Dengan demikian dapat diduga bahwa cluster-1 adalah pengelompokan UMKM yang belum menerapkan tata kelola korporat.

Mengingat tingkat pendidikan dari pengelola UMKM pada cluster-1 lebih banyak didominasi oleh 19 responden berpendidikan SMP dan 44 responden berpendidikan SMA, seperti yang ditunjukkan pada tabel 7 dan berdasarkan status usaha dari UMKM didominasi oleh UMKM yang berstatus usaha belum berbadan hukum seperti yang ditunjukkan pada tabel 8.

Tabel 7. Tingkat Pendidikan

count		PENDIDIKAN					Total
		1	2	3	4	5	
Cluster	1	1	19	44	2	0	66
Number of Case	2	0	6	18	1	3	28
	3	0	2	0	0	0	2
Total		1	27	62	3	3	96

Sumber: Data diolah

Tabel 8. Status Usaha

		STATUS USAHA		Total
		0	1	
Cluster Number of Case	1	66	0	66
	2	5	23	28
	3	2	0	2
Total		73	23	96

Sumber: Data diolah

Cluster-2

Karakteristik responden yang dikelompokkan sebagai cluster-2 yaitu badan usaha yang memiliki rata-rata nilai variabel transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban independensi dan kewajaran yang lebih dari rata-rata sampel dari responden yang diteliti. Hal ini terbukti dari nilai positif (+) dalam keseluruhan variabel yang terdapat pada tabel *Final Cluster Centers*. Dengan demikian dapat diduga bahwa cluster-2 merupakan pengelompokan responden UMKM yang melaksanakan tata kelola korporat.

Pada cluster-2 tingkat pendidikan responden sudah lebih baik dari cluster-1 yang didominasi oleh responden yang berpendidikan SMP dengan 6 responden dan SMA dengan 18 responden, sedangkan Diploma ada 1 responden dan Sarjana (S1) ada 3 responden, seperti yang ditunjukkan pada tabel 7.

Berdasarkan status usaha dari UMKM didominasi oleh UMKM yang berstatus usaha yang sudah berbadan hukum sebesar 23 UMKM, sedangkan yang belum berbadan hukum jumlahnya lebih banyak sebanyak 73 UMKM, seperti yang ditunjukkan pada tabel 8.

Pada tabel 9 tentang omzet usaha yang dicapai UMKM. Rata-rata nilai yang dicapai oleh UMKM setiap bulannya pada cluster-2 lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar. Hal ini diperkuat oleh tabel 10 *Chi-Square Tests* yang menghasilkan nilai p-value 0.00 ($< 0,05$) artinya terdapat hubungan antara cluster yang terbentuk berdasarkan latar belakang omzet usaha.

Tabel 9. Omzet Usaha

		OMZET USAHA			Total
		1	2	3	
Cluster Number of Case	1	51	13	2	66
	2	5	21	2	28
	3	2	0	0	2
Total		58	34	4	96

Sumber: Data diolah

Tabel 10. Chi-Square Test

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	30.601 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	32.067	4	.000
Linear-by-Linear Association	14.348	1	.000
N of Valid Cases	96		

Sumber: Data diolah

Ditinjau dari nilai aset yang dimiliki UMKM, menunjukkan bahwa UMKM yang berada pada cluster-2 didominasi oleh UMKM yang telah mencapai nilai aset diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar. Hal ini juga diperkuat oleh tabel *Chi-Square Tests* yang menunjukkan nilai p-value 0.01 ($< 0,05$), artinya adanya hubungan antara cluster yang terbentuk berdasarkan latar belakang nilai aset. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 12.

Tabel 11. Nilai aset

Count	NILAI ASET			Total	
	1	2	3		
Cluster Number of Case	1	32	32	2	66
	2	2	22	4	28
	3	2	0	0	2
Total		36	54	6	96

Sumber: Data diolah

Tabel 12. Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.513 ^a	4	.001
Likelihood Ratio	22.648	4	.000
Linear-by-Linear Association	7.356	1	.007
N of Valid Cases	96		

Sumber: Data diolah

Cluster-3

Karakteristik responden UMKM yang termasuk sebagai kelompok cluster-3 yaitu Badan usaha yang memiliki rata-rata independensi melebihi rata-rata sampel dari responden yang diteliti. Untuk instrumen variabel yang lain seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran terhadap tata kelola berada dibawah rata-rata sampel. Dengan demikian dapat diduga sekumpulan responden UMKM yang kecil jumlahnya berada pada cluster-3. Hal ini ditunjukkan pada tabel sebelumnya baik dari

pendidikan, status usaha, omzet usaha maupun nilai aset yang dimiliki berada pada kategori 1 dan belum berbadan hukum. Hal tersebut diperkuat dari hasil signifikansi pada tabel *chi-square tests* yang menunjukkan adanya hubungan antara cluster yang terbentuk dengan latar belakang pendidikan, status usaha, omzet usaha maupun nilai aset.

Tabel 13. Chi-Square Tests

Chi-Square Tests	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	73.456 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	79.439	2	.000
Linear-by-Linear Association	50.411	1	.000
N of Valid Cases	96		

Sumber: Data diolah

Tahap analisis selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengetahui perbedaan variabel pada cluster yang terbentuk. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel Anova dari nilai F dan nilai probabilitas (sig) masing-masing variabel seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 14. ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	Df	Mean Square	df		
Zscore(TR ANSPAR ANSI)	38.031	2	.204	93	186.762	.000
Zscore(A KUNTABILITAS)	26.721	2	.447	93	59.799	.000
Zscore(PE RTGGJA WABAN)	30.806	2	.359	93	85.808	.000
Zscore(INDEPENDENSI)	4.340	2	.928	93	4.676	.012
Zscore(KEWAJARAN)	17.224	2	.651	93	26.453	.000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Sumber: Data diolah

Pada tabel 14, hasil uji anova menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value} < 0,05$, hal ini menjelaskan bahwa penilaian antar cluster berbeda secara signifikan. Hasil cluster yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen transparansi adalah variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan diantara UMKM pada ketiga cluster yang terbentuk. ini dapat ditunjukkan dari nilai $F = 186,762$ dan $\text{sig} = 0,000$.

Kemudian variabel kedua adalah pertanggung jawaban dan variabel ketiga adalah akuntabilitas. Hasil tersebut dapat terjadi karena berdasarkan anggota UMKM di masing-masing cluster pada cluster 1 lebih banyak dibanding pada cluster 2 dan 3. Hal Selanjutnya untuk mengetahui jumlah anggota masing-masing cluster yang terbentuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 15. Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	66.000
	2	28.000
	3	2.000
Valid		96.000
Missing		.000

Sumber: Data diolah

Analisis dan Pembahasan

Hasil analisis data menggunakan *K-Means clustering*, menunjukkan bahwa terdapat 66 UMKM belum menerapkan tata kelola korporat dan sejumlah 28 UMKM yang telah melaksanakan tata kelola korporat. Apabila dijabarkan dalam tingkat pelaksanaan tata kelola korporat menggunakan *scoring* dapat diperoleh hasil pada tabel 16 berikut:

Tabel 16. Hasil Skor penerapan tata kelola korporat

NO	Prinsip Tata Kelola	Jumlah Berdasarkan Kategori							
		Sangat Baik		Baik		Buruk		Sangat Buruk	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Transparansi	13	14	20	21	57	59	6	6
2	Akuntabilitas	14	15	26	27	48	50	8	8
3	Pertanggung jawaban	74	77	20	21	0	0	2	2
4	Independensi	22	22	51	53	24	25	0	0
5	Kewajaran & Kesetaraan	21	22	39	41	35	36	1	1

Sumber: Data diolah

Tabel 17. Tingkat Pelaksanaan Tata Kelola Korporat UMKM

Skor	Kategori	Jumlah Responden	%
71 - 88	Amat Baik	14	15
53 - 70	Baik	32	33
35 - 52	Buruk	48	50
17 - 34	Sangat Buruk	2	2

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data pada tabel 16 pelaksanaan tata kelola korporat pada UMKM di Pekalongan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan baik terutama pada penyusunan laporan keuangan dan akuntansi. Transparansi dan akuntabilitas dari UMKM masih lemah. Keterbukaan informasi apakah itu untuk proses pengambilan keputusan atau informasi terkait dengan keuangan dan non keuangan tidak jelas, tidak transparan. Banyak dari responden yang menyatakan hanya laporan laba rugi yang disusun, dan sebagian lagi selain laporan laba rugi juga neraca. Demikian juga dalam menyampaikan informasi baik keuangan dan non keuangan kepada investor atau kreditor juga belum atau sangat jarang dilakukan. Penyampaian pelaksanaan kegiatan kepada pemberi modal ataupun penjelasan mengenai pola penggajian atau pemberian honor pada para pegawainya juga tidak pernah dilakukan. Peraturan mengenai penggajian/pemberian honor biasanya dilakukan secara lisan, sehingga tidak dapat memberikan kejelasan pada masing-masing individu yang berkerja pada UMKM tersebut. Hal ini sangat berhubungan dengan status badan usaha UMKM, lihat tabel 18 karena hanya 24% saja UMKM yang telah berbadan hukum. Status UMKM yang telah berbadan hukum maka memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan secara lengkap dan kontinyu.

Tabel 18. Status Badan Usaha Responden

Status Usaha	Jumlah	%
Sudah Berbadan Hukum	23	24
Belum Berbadan Hukum	73	76
Total	96	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil yang terdapat pada tabel 16, dan sesuai dengan hasil yang terdapat pada tabel 14, menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antar cluster, serta menunjukkan adanya perbedaan diantara cluster-cluster yang ada berdasar prinsip transparansi.

Sedangkan untuk akuntabilitas bagi UMKM, yang berkaitan struktur pertanggungjawaban dengan sistem yang dimiliki perusahaan juga terdapat kelemahan. Banyak dari UMKM tersebut yang melakukan perangkapan fungsi untuk tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Rincian tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi pegawai juga tidak ada, karena sering sekali pimpinan perusahaan melakukan perubahan-perubahan peraturan/ketentuan terutama ketentuan atau peraturan tersebut tidak tertulis. Tidak memiliki prosedur operasi yang sudah distandarkan dengan baik. Tidak memiliki pedoman perilaku yang telah dibakukan, dan pemberian sistem bonus dan sanksi bagi pegawai tidak jelas. Masalah-masalah tersebut membuat pelaksanaan tata kelola UMKM menjadi tidak baik.

Sedangkan untuk kategori pelaksanaan tata kelola korporat 33% baik, dan 15% amat baik, sangat dominan dipengaruhi oleh prinsip pertanggungjawaban dan prinsip independensi (kemandirian) UMKM. Pertanggungjawaban sangat dibutuhkan dalam hal kepatuhan terhadap landasan hukum perusahaan serta segala peraturan hukum untuk mengelola bisnis. Proses tersebut dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan yang telah dianggarkan, kepatuhan terhadap setiap perjanjian kesepakatan. Misalnya pembayaran pengembalian pinjaman tepat waktu, termasuk juga penyampaian laporan perkembangan usaha kepada pemberi pinjaman. Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, yaitu ketepatan penyampaian surat setoran pajak dan pembayaran pajak.

Independensi yang dipahami sebagai bentuk tidak adanya konflik kepentingan atau adanya pengaruh dari pihak-pihak yang bertentangan dengan perundang-undangan rluaku dan landasan hukum perusahaan. Adanya kemandirian untuk memilih pemasok atau distributor, penentuan tenaga kerja, serta penyusunan rencana kerja dan mengambil keputusan yang dilakukan manajer tanpa campur tangan oleh pemilik atau investor/kreditor

Kondisi di atas yaitu dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh untuk tingkat pendidikan SMP

terdapat 6 responden, tingkat pendidikan SMA terdapat 18 responden sedangkan tingkat Diploma ada 1 responden serta Sarjana sebanyak 3 responden. Pada UMKM yang telah berbadan hukum dan memiliki omzet yang mencapai Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar, hal ini jelas sangat membutuhkan suatu pengelolaan yang baik dan sehat terhadap UMKM tersebut.

Prinsip kewajaran dan kesetaraan mempunyai skor 22% sangat baik dan 41% baik. Penjelasan untuk prinsip ini relevan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa perlakuan yang seimbang untuk memuaskan hak-hak bagi pemangku kepentingan haruslah sesuai serta patuh terhadap kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pengawasan oleh pemberi modal UMKM baik melalui rapat koordinasi dan atau laporan yang dikirim secara periodik kepada para pemberi modal. Sedangkan ketidaksetaraan terlihat dari perlakuan yang tidak sama, misalnya pemberian gaji/honor untuk karyawan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan dan karyawan non-keluarga, besarnya berbeda.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan penelitian Niode (2009), bahwa masalah manajemen non keuangan diantaranya adalah Ketergantungan pada sumber daya manusia serta kesulitan untuk memajukan SDM, Lemahnya wawasan mengenai keuangan dan akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian UMKM sektor industri tekstil di pekalongan, berdasarkan data Pendidikan sebagian besar tingkat pendidikan antara SD sampai SMA (93%) sehingga pengetahuan tentang keuangan dan akuntansi terkait dengan tata kelola perusahaan masih kurang. Berdasarkan hal tersebut bagi para pelaku UMKM agar dapat melaksanakan fungsi pengendalian dan membangun keberlanjutan usaha maka perlu menyusun laporan keuangan secara kontinu. Hasil penelitian ini, juga menunjukkan dari 97 sampel UMKM industri tekstil di Pekalongan hanya sebesar 30% yang menyusun laporan keuangan.

Menurut Zhang dan Thiam (2014) menyatakan reputasi dari SME dapat meningkat karena pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan baik. Reputasi pada UMKM yang memiliki tata kelola akan menjadi semakin baik apabila pelaku bisnis dapat melakukan penjajakan untuk bermitra dengan usaha asing (luar negeri), dengan melakukan ekspor. Akan tetapi hal ini masih menjadi kesulitan untuk dilakukan.

Menurut Koech dkk. (2016) dalam hasil penelitian dinyatakan jika struktur organisasi dapat

menjadi baik, maka harus menempatkan pemimpin yang totalitas dan proses pemilihan pemangku atau direksi harus melalui prosedur secara transparan. Hal ini sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kesetaraan yang mempunyai skor yang baik

SIMPULAN

Dari hasil paparan dapat disimpulkan (1) Pelaksanaan tata kelola pada UMKM di Pekalongan khususnya untuk industri produk tekstil yang sudah dilakukan adalah prinsip pertanggungjawaban kemudian prinsip independensi, kewajaran dan kesetaraan berikutnya prinsip akuntabilitas dan terakhir adalah prinsip transparansi sehingga dikategorikan bahwa pelaksanaan tata kelola masih rendah khususnya pada prinsip transparansi dan akuntabilitas; (2) Tingkat pendidikan yang semakin tinggi, juga berkaitan dengan tingkat kesadaran akan manfaat dari adanya laporan keuangan yang dibuat secara kontinu agar pelaku bisnis dapat melakukan fungsi pengendalian secara internal serta dapat membangun usaha secara berkelanjutan berdasarkan prinsip tata Kelola dan (3) UMKM yang telah berbadan hukum, juga menunjukkan kepatuhannya untuk melaksanakan tata kelola korporat yang lebih baik.

Berdasarkan pada hasil kesimpulan peneliti dapat memberikan saran kepada pelaku UMKM, bahwa (1) Perlu bagi pelaku UMKM untuk selalu menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk dalam menginformasikan setiap kegiatan UMKM. Agar dapat terus mempertahankan keberlanjutan usaha, (2) Bagi pemerintah, sudah saat saatnya UMKM perlu memiliki pedoman pelaksanaan tata kelola korporat, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memandu pelaksanaan tata kelola korporat yang baik dan (3) Untuk menstimulasi ketrampilan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan UMKM, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan implementasi SAK-ETAP secara berkesinambungan.

Keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Terdapat kelemahan pada instrumen yang digunakan peneliti sebagai sarana menggali informasi bagi UMKM. Hal ini dikarenakan item-item pertanyaan untuk UMKM tidak sesuai dengan karakteristik UMKM. Sedangkan dalam penelitian ini mengacu sepenuhnya dari pelaksanaan tatakelola pada korporasi yang berpedoman pada KNKG; dan (2) Subjektivitas dalam mengisi kuesioner oleh

responden sangat mungkin terjadi, karena beberapa sebab yang dimungkinkan terjadi karena lemahnya instrumen dalam penelitian ini atau kejujuran dari responden dalam mengisi kuesioner. Hal lain adalah tidak adanya pendampingan dari peneliti saat responden mengisi kuesioner tersebut, sehingga dapat terjadi kekurangan pemahaman atas item-item pertanyaan yang diajukan.

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik. (2011). Statistik Indonesia 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Daniri, A. M. (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Donaldson, L. dan Davis, J. H. (1989). CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. *Paper dipresentasikan pada the annual meeting of the Academy of Management, Washington DC*.
- Donaldson, L. dan Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO Governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Hart, O. (1995). Corporate Governance: Some Theory and Implications, *The Economic Journal*, 105(430), 678-689.
- The Indonesian Institute for Corporate Governance. (2004). *Internalisasi Good Corporate Governance dalam Proses Bisnis*. Laporan Corporate Perception Index.
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, (1-77).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Koehn, P., Namusonge, G. S. dan Mugambi, F. M. (2016). Board Characteristic as a Determinant of Effectiveness of Corporate Governance in State Corporation in Kenya. *International Journal of Business and Commerce* 5(4), 37-62.
- Lane, S., Astrachan, J., Keyt, A. dan McMillan, K. (2006). Guidelines for Family Business Boards of Directors. *Family Business Review*, 19(2), 147-167.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. LPPi dan Bank Indonesia.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2016, Januari 29). Jawa Tengah Dominasi Investasi di Sektor Tekstil. *Koran Sindo*. Didapat dari <https://kemenperin.go.id/artikel/14207/Jawa-Tengah-Dominasi-Investasi-di-Sektor-Tekstil>, 26 Januari 2017, pukul 17.20 WIB.
- Maskur, A. (2012). *Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance di Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Studi Kasus pada Mitra Binaan Unit PKBL PT Taspen (Persero)*. (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia). Didapat dari <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20312683&lokasi=lokal>.
- Niode, I. Y. (2009). Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, 2(1), 1-10.
- Nugraheni, B. D. dan Martono, C. (2015). *Analisis Mekanisme Tata Kelola, Manajemen Laba dan Pengungkapan Informasi Lingkungan Perusahaan pada Industri Manufaktur di Indonesia*. Penelitian tidak dipublikasikan di Unika Widya Mandala Surabaya.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2009). *Practical Guide to Corporate Governance: Experience from Latin American Companies*. Washington, DC: International Finance Corporation.
- Palupijati, S. dan Sivilonom., N. I. (2013). *Tata Kelola pada UKM: Perbandingan Penerapan Pada Bisnis Keluarga dengan Bisnis Non Keluarga*. (Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia). Didapat dari <http://repository.ugm.ac.id/125670/>
- Putri, W. H. dan Bakhtiar, I. (2015). Sistem Tata Kelola Keuangan Industri Kecil dan Pengrajin Kayu sebagai Upaya Penyehatan dan Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Pengentasan Kemiskinan. *Paper dipresentasikan dalam Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Santoso, S. (2008). *Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sarwono, J. (2009). *Statistik itu Mudah: Panduan Lengkap untuk Belajar Komputasi Statistik menggunakan SPSS 16*. Yogyakarta: Andi Publishers.
- Shahab, M. A. (2012). SME Governance and Staffs Empowerment on SMEs Performance in Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 17(2), 113-119.
- Simamora, B. (2005). *Analisis Multivariat Pemasaran Edisi Pertama*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang -Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 20. (2008). Didapat dari <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-151-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>, 9 Maret 2017, pukul 18.23 WIB.

Zhang, X. dan Thiam, M. (2014). Assessing the role of stakeholders in the implementation of SME's Governance Principles in France. *International Journal of Business and Commerce*, 3(5), 69-81.